

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA TASIKMALAYA

Asep Soni Ramdani¹

Program Pascasarjana STIA YPPT Priam Tasikmalaya

e-mail: asepsoniramdani78@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan dan
Retribusi Jasa Umum

Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum di Kota Tasikmalaya dalam studi Kasus Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus di UPTD SPALD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tasikmalaya masih belum efektif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendalami faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pencapaian tujuan kebijakan terkait Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus oleh UPTD SPALD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menggunakan sumber data yang berbeda untuk memahami topik yang dipelajari. Sumber data ini meliputi wawancara mendalam, kelompok fokus, wawancara, dan dokumentasi terkait lainnya. Penelitian ini termasuk dalam studi kasus dimana peneliti menelaah secara kualitatif secara detail dan terstruktur serta tidak terstruktur menurut studi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan, implementasi kebijakan tersebut belum mencapai target yang ditentukan, sehingga belum diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut, selain itu belum berdampak luas pada target sasaran, dimana masih terdapat kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh UPTD SPALD Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan semua kebijakan. Pencapaian tujuan kurang mendapat dukungan dari pengambil kebijakan yaitu dengan memenuhi kebutuhan berupa sarana dan prasarana kerja, serta kurangnya strategi dari pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Faktor sasaran belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, dimana masyarakat cenderung kurang peka terhadap kesehatan lingkungannya dengan membiarkan septic tank terisi penuh sehingga mencemari lingkungan sekitarnya

ABSTRACT

Key word:

Policy Implementation and
Public Service Retribution

The implementation of the Public Service Retribution Policy in Tasikmalaya City in the Case Study of the Retribution for the Provision and Suction of Toilets at the UPTD SPALD Department of Housing and Settlement of the City of Tasikmalaya is still not effective. This study aims to uncover and explore the supporting and inhibiting factors of achieving policy objectives related to Retribution for the Supply and Suction of Toilets by UPTD SPALD at the Department of Housing and Settlement of the City of Tasikmalaya. The method used is qualitative, using different data

sources to understand the topic being studied. Sources of this data include in-depth interviews, focus groups, interviews, and other related documentation. This research is included in a case study where the researcher examines qualitatively in detail and is structured and unstructured according to the research study. The data analysis technique used includes data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. Based on the results of policy research, the implementation of the policy has not reached the specified target, so that it has not benefited from the existence of this policy, besides that it has not had a broad impact on the target target, where there is still a lack of resources owned by the UPTD SPALD Kota Tasikmalaya in implementing all policies. Achievement of objectives lacks support from policy makers, namely by fulfilling needs in the form of work facilities and infrastructure, as well as a lack of strategy from policy implementers to achieve policy objectives. The target factors have not fully supported the policy, where people tend to be less sensitive to the health of their environment by allowing the septic tank to fill up so that it pollutes the surrounding environment.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah saat ini merupakan upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah, memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan nasional yang layak bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sehingga baik kekayaan alam maupun manusia yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan. Melalui otonomi daerah secara luas dimaksudkan sebagai upaya memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat yang lebih dekat dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penggalian sumber-sumber pendapatan oleh Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disertai dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang menyertainya. Proses pembuatan kebijakan memengaruhi adopsi, relevansi, dan efektivitasnya. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan didukung secara luas dan dapat dioperasionalkan. Reformasi atau pembangunan kelembagaan melengkapi kebijakan dalam hal memperkenalkan pendekatan berbasis sumber daya lokal ke dalam sistem penyampaian.

Pembuatan kebijakan skala lokal diperuntukan untuk mengatur dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Penerbitan peraturan tersebut di atas sebagai upaya meningkatkan PAD, namun demikian dalam pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan dan

permasalahan terutama dalam pencapaian target dari penerimaan retribusi yang diperoleh, dimana beberapa hambatan di antaranya kurangnya sarana dan prasarana kerja bagi pelaksana kebijakan, disamping tingkat kesadaran masyarakat Kota Tasikmalaya untuk melakukan penyedotan septic tank atau tangki septik yang masih sangat rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tahapan ketiga dari siklus kebijakan yang berarti tahapan proses kebijakan segera setelah undang-undang disahkan, atau tindakan yang akan diambil untuk menegakkan hukum atau masalah yang akan dihadapi. diselesaikan. Implementasi dipandang sebagai makna terluas dari administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan yang diadopsi dalam upaya mencapai kebijakan atau tujuan program.

Definisi implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn (Agustino, 2008, hal. 195), menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/penjabat, pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan".

Pengembangan dan implementasi kebijakan seringkali digambarkan sebagai tahapan yang berbeda dan terpisah dalam siklus kebijakan. Dalam praktiknya, batasan antara pengembangan dan implementasi kebijakan menjadi sangat kabur. Selama fase pengembangan kebijakan, masalah politik dan teknis perlu ditangani. Masalah politik termasuk keanggotaan, visi, dan berurusan dengan oposisi. Masalah teknis termasuk pengumpulan bukti dan data tentang apa yang berhasil, perencanaan pelaksanaan, dan langkah wajib lainnya yang diperlukan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, termasuk konsultasi publik.

Definisi implementasi sendiri dikemukakan Jones (Silalahi, n.d., hal. 149–150) menyatakan: "Implementasi adalah konsep yang dinamis dan membutuhkan upaya terus-menerus untuk menanggapi apa yang harus dijalankan. Oleh sebab itu pelaksanaannya akan membakukan kegiatan yang berdampak pada pelaksanaan program".

Konteks implementasi kebijakan sangat penting, dimana pada saat mengimplementasikan kebijakan, banyak upaya implementasi lainnya dapat dilakukan pada waktu yang sama di berbagai bagian sistem. Koherensi dapat membantu menciptakan iklim untuk implementasi yang sukses. Legislasi mungkin diperlukan sebelum kebijakan dapat diterapkan sepenuhnya, atau mungkin perlu untuk memastikan konsistensi dengan undang-undang nasional dan internasional yang ada. Mungkin ada sinergi atau divergensi dengan kebijakan atau strategi pemerintah lainnya. Kebijakan dapat berinteraksi satu sama lain, menghasilkan konsekuensi baru, yang tidak diinginkan, dan terkadang tidak diinginkan. Mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang lebih kompleks diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan, salah satunya menurut Grindle (Rusli, 2015, hal. 98) terdapat dua kelompok utama yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*).

Beberapa faktor lain yang dapat mencapai keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya kepemimpinan, komunikasi dan umpan balik. Kepemimpinan dibutuhkan di semua tingkat sistem untuk implementasi kebijakan. Dari perspektif politik, tingkat kepemimpinan yang tepat diperlukan untuk membentuk kembali mandat, sumber daya, struktur, dan program. Koherensi dalam kepemimpinan juga disarankan sebagai fasilitator implementasi, seperti posisi jangka tetap bagi pejabat senior di kementerian, untuk memastikan kontinuitas dan memperkuat hubungan. Literatur tentang kepemimpinan untuk implementasi kebijakan juga menekankan perlunya gaya kepemimpinan politik, yang menekankan pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan, mengelola kompleksitas dan konflik, saling ketergantungan dan pengelolaan tanggung jawab yang beragam dan saling bertentangan.

Komunikasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi keberhasilan implementasi kebijakan dan harus menjadi jantung pengembangan kebijakan sejak awal dan sepanjang tahapan implementasi. Komunikasi sistematis penting untuk berbagi informasi dan umpan balik tentang bagaimana kemajuan implementasi di semua situs, dan untuk berbagi kemenangan dan pencapaian kebijakan untuk mempertahankan keterlibatan dan motivasi pemangku kepentingan.

Mekanisme umpan balik harus ditetapkan antara pembuat keputusan dan praktisi garis depan setelah implementasi dimulai, untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sebagaimana dimaksud, bahwa konsekuensi yang tidak diinginkan ditangani secara efektif, dan untuk mendukung kapasitas pembelajaran sistem. Mekanisme umpan balik dapat mencakup pengaturan untuk pelaporan reguler dan standar dari layanan garis depan hingga struktur pengawasan kebijakan, dan tinjauan kebijakan yang dilakukan pada poin-poin utama dalam siklus hidup kebijakan, misalnya tinjauan jangka menengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang fenomena yang terjadi, dan dapat menemukan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam objek penelitian. Selanjutnya dalam melakukan analisis data penelitian terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPTD SPALD yang berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya terbentuk sejak 2018. Namun

operasionalnya baru efektif mulai 2019. UPTD SPALD Kota Tasikmalaya menyebutkan lembaga yang dipimpinnya ini belum memiliki payung hukum yang secara spesifik mengatur teknis pengelolaan air limbah domestik. Dengan demikian, untuk penarikan retribusi saat ini masih menggunakan peraturan daerah yang lama tentang retribusi jasa umum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang bahwa kebijakan retribusi penyedotan kakus belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa pelayanan penyedotan kakus ini lebih dikuasai oleh pihak swasta. Oleh karena itu sudah semestinya pihak dari UPTD SPALD Kota Tasikmalaya untuk gencara melakukan sosialisasi kebijakan ini agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan pelaksanaan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kota Tasikmalaya oleh para pegawai telah bekerja sesuai prosedural. Tarif retribusi yang dibebankan kepada pengguna layanan dalam hal ini masyarakat pengguna jasa tidak terlalu mahal atau masih wajar. Data yang ada di UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya, dari sekitar 41 persen KK yang sudah terindikasi menggunakan tangki septik (terindikasi TS), namun belum semuanya rutin melakukan penyedotan kakus.

Pada dasarnya, masyarakat di Kota Tasikmalaya menyadari betul bahwa air limbah rumah tangga sebagai hasil buangan manusia mengandung kuman-kuman yang berbahaya bagi kesehatan, oleh karena itu diperlukan adanya upaya penanganan dan pengelolaan sanitasi lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang bersih, sehat dan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dimana air limbah rumah tangga tersebut harus dibuang pada tempatnya dan diperlukan metode dan sarana khusus untuk mengolahnya.

Strategi yang dapat dilakukan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan, diperlukan adanya bkerjasama kemitraan swasta –pemerintah. Sektor swasta telah terbukti tidak tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk yang lebih tinggi dari kerjasama swasta -pemerintah atau PPP (disebut konsesi). Prospeknya lebih bagus apabila layanan operasi dan pemeliharaan air limbah diintegrasikan secara penuh dengan pengoperasian penyediaan air bersih. Pemerintah kota mungkin bisa berpendapat bahwa Kerjasama Pemerintah -Swasta menarik karena beberapa alasan, termasuk:

1. Menyediakan sumber-sumber alaternatif pendanaan, ketimbang (a) memanfaatkan sumber daya public yang langka, (b) peningkatan utang masyarakat. Apabila pemerintah memberikan subsidi maka, apabila tidak dapat dihilangkan, ongkosnya dapat dikurangi.
2. Meningkatkan kualitas tingkat dan kualitas pelayanan kepada pelanggannya. Di seluruh dunia kreatifitas bisnis dan inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta telah terbukti menghasilkan penambahan efisiensi.

3. Untuk meminimalisir resiko, hal ini karena kerja sama harus dirancang untuk mengalokasikan resiko kepada mitra yang paling bisa mengelola resiko tersebut yang dengan demikian dapat meminimalisir biaya sambil meningkatkan kinerjanya; dan/atau
4. Bila diinginkan, mereformasi penyediaan layanan publik melalui realokasi fungsi, insentif dan pertanggungjawaban. Skema kerja sama sebelumnya dengan pihak swasta kurang transparan dan terlalu ambisius. Sebelumnya kepentingan sosial terabaikan, yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Adanya analisis kritis tentang PSP telah membawa pada rancangan transaksi generasi baru, yang sekarang lebih umum disebut sebagai PPPs (Public -Private Partnership/Kerjasama Pemerintah dan Swasta).

Pengelolaan air limbah sebagai salah satu aspek penyehatan lingkungan merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi secara optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas kebersihan lingkungan dan perilaku / kebiasaan yang tidak memperhatikan kesehatan, seperti penggunaan saluran drainase dan sungai sebagai pembuangan limbah. tempat pembuangan. Air limbah domestik dari kotoran manusia mengandung kuman yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga diperlukan upaya untuk menangani dan mengelola sanitasi lingkungan untuk mewujudkan kehidupan yang bersih dan sehat serta menjaga lingkungan yang berkelanjutan di mana air limbah domestik harus dibuang. di mana dan metode yang diperlukan serta cara khusus untuk menanganinya.

Menyadari hal tersebut di atas maka pemerintah dalam rangka meningkatkan pengelolaan sektor air limbah perkotaan telah melakukan berbagai upaya yang dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pekerjaan Umum membuat suatu Rencana SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) untuk Kota Tasikmalaya. Dimana lokasi yang digunakan sebagai kawasan perencanaan adalah Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 18.385,09 hektar.

Selain adanya regulasi mengenai pembayaran untuk penyediaan dan penyedotan WC, masalah utamanya adalah pentingnya pengelolaan air limbah yang dihasilkan masyarakat. Sistem pembuangan limbah kota Tasikmalaya berupa air limbah domestik (rumah tangga) biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem sanitasi lokal (on site sanitasi) berupa jamban, dikelola secara individu maupun kolektif, dilengkapi dengan septic tank atau cubluk. . Pada saat yang sama, menyiapkan sistem sanitasi terpusat (sanitasi luar lokasi) membutuhkan banyak biaya untuk memeliharanya.

Sistem pengelolaan air limbah ini sangat erat kaitannya dengan sanitasi atau kesehatan lingkungan, sehingga pengelolaan air limbah ini harus direncanakan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, arahan rencana pengelolaan air limbah di Kota Tasikmalaya akan selalu dilakukan dengan menggunakan sistem pengolahan lokal (on site sanitation system) yaitu dengan mengembangkan sistem penggunaan septic tank di

setiap rumah, selanjutnya meningkatkan kuantitas dan kualitas harus melengkapinya dengan bidang infiltrasi.

Mengingat ketersediaan jamban yang dilengkapi dengan septic tank, tidak semua kelompok masyarakat mampu menyediakannya karena harus tersedia lahan yang cukup, sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan berupa jamban atau jamban umum. Dengan adanya septic tank ini diharapkan kotoran bahan organik yang mengendap setelah waktu tertentu akan terurai sehingga tidak mencemari lingkungan dan menghasilkan pupuk bagi tanaman yaitu secara teknis per orang / tahun dengan frekuensi Pembuangan 1 s / d 4 tahun, ruang gas disediakan dengan luas 30 cm³. Zona resapan tersebut memiliki dimensi lebar 50 cm, panjang 150 cm dan kedalaman 70 cm.

Mengingat penggunaan septic tank membutuhkan lahan yang luas, maka untuk kawasan padat penduduk dilakukan terlebih dahulu melalui sistem perpipaan kemudian dialirkan ke septic tank kota. Hal ini dilakukan agar ke depan sistem pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dapat secara bertahap menghubungkan rumah tangga dengan sistem wilayah atau bahkan dengan sistem kota. Sehubungan dengan masalah sanitasi ini, diperlukan beberapa hal penting, yaitu:

1. Tips bagi warga untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan membuang kotoran dimana-mana. Warga diharapkan mampu membangun fasilitas sanitasi sendiri di rumah masing-masing serta membangun jamban bagi warga yang padat penduduk atau kelompok yang kurang mampu secara ekonomi.
2. Penyediaan kendaraan pengangkut kotoran untuk membersihkan dan mengosongkan lumpur dari septic tank yang sudah penuh.
3. Pemantauan untuk memantau pengelolaan air limbah rumah tangga, serta kualitas dan kuantitas badan air di perkotaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum mencapai target yang ditargetkan, sehingga belum mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga belum melakukan perubahan terhadap kebijakan target, dimana masih terdapat kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh UPTD SPALD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tasikmalaya sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. .

Pencapaian tujuan kebijakan menunjukkan kurangnya dukungan dari pengambil kebijakan dengan pemenuhan saran dan infrastruktur, selain itu juga kurangnya strategi dari pelaksana kebijakan dalam mencapai target retribusi penyediaan dan sedot jamban yang telah ditetapkan. Dari faktor sasaran sasaran atau masyarakat belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, dimana masyarakat cenderung kurang tanggap terhadap kesehatan lingkungannya dengan membiarkan tangki septik terisi penuh atau mencemari lingkungan sekitarnya. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan

masih kurang karena belum adanya pemeliharaan septic tank, khususnya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.

Silalahi, U. (n.d.). *Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen*. Mandar Maju.